

Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka

Agustina Paji¹, Henrikus herdi², Yan Yanitza Salvanos³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Jl Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka,
Nusa Tenggara Timur 86094

Abstract This research aims to determine the performance of the village government in managing village fund allocation in Kesokoja Village, Palue District, Sikka Regency. The design of this research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, documentation and interviews. The type of data in this study is a type of qualitative data with primary data sources and secondary data sources. Data analysis in this study was in the form of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the performance of the village government in managing village fund allocation is quite good, seen from several indicators, namely responsiveness, responsiveness and accountability. However, there are two indicators that have not gone well, productivity and service quality. Therefore, the assessment of productivity and service quality in the Kesokoja Village government must be improved. The preparation of activity programs must prioritize the programs contained in village development planning meetings as well as the transparency of village government officials towards the community in their accountability for managing Village Fund Allocations.

Keywords: Village Government Performance, Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, Accountability.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka. Rancangan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah cukup baik, dilihat dari beberapa indikator yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Namun ada dua indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu produktivitas dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penilaian produktivitas dan kualitas pelayanan di pemerintah Desa Kesokoja harus ditingkatkan. Penyusunan program kegiatan harus memprioritaskan program yang tertuang dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa serta adanya transparansi aparat pemerintah desa kepada masyarakat dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci : Kinerja Pemerintah Desa, Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas.

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya desa merupakan sebuah organisasi pemerintahan paling rendah ditingkat kabupaten secara umum yang memiliki kewenangan penuh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan serta untuk mewujudkan tujuan tertentu. Setiap desa diharapkan dapat menjalankan dan mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah setempat yang didasari dengan peraturan yang berlaku.

Desa juga merupakan bagian institusi yang otonomi dengan didalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diatas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada didalamnya.

Received: 30 July 2023 ,Revised: 30 August 2023 ,Accepted: 09 September 2023

* Agustina Paji,

Akibat dari otonom desa adalah kemunculan desa yang otonom, dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Sehubungan dengan perkembangan zaman, terutama menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan, maka pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh karena kewenangan desa sudah ada sejak dulu berdasarkan hak asal usul (Widjaja 2008), otonomi desa menjadi sebuah harapan dan tantangan bagi pemerintah desa serta masyarakat desa. Harapan dalam arti bahwa masyarakat desa dapat memberikan aspirasi dan contoh terhadap birokrasi pemerintah desa. Disisi lain otonomi desa memberikan tantangan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. APBDes harus menjadi sebuah cermin harapan dan tuntutan masyarakat yang nantinya akan diwujudkan oleh pemerintah desa. Selain itu perencanaan dan penyusunan APBDes diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sehingga tidak lagi masuk dalam kategori desa tertinggal, wewenang yang luas tetap diatur sesuai dengan undang-undang yang merupakan salah satu aspek yang ikut berperan dalam pembangunan desa.

Sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia, desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di desa, termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan desa sendiri (Labolo, 2017). Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki peranan penting dalam penyusunan atau lebih tepatnya dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Seperti halnya beberapa desa di Kecamatan Palue mendapat anggaran dana desa (DD) dan pemerintah pusat dan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten Sikka serta memiliki peran yang cukup besar untuk melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa. Dana desa ditujukan kepada desa-desa sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Dalam peraturan pemerintah disebutkan adanya penyaluran dana desa (DD) dan Aokasi Dana Desa (ADD), penyerahan urusan dari kabupaten / kota kepada desa, pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif dan penataan wilaya desa. Berpijak dari hal tersebut, maka fokus utamanya adalah efektifitas penyaluran dana desa dan dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator kinerja pemerintahan. Hal ini sangat penting karena sebagian besar penduduk di Kecamatan Palue bertempat tinggal diwilayah desa. Diimplementasikannya undang-undang desa menjadi perbincangan banyak kalangan dalam

pengelolaan keuangan desa, yang didalamnya terdapat pengelolaan sumber dana desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam undang-undang desa memicu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Undang-undang desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya, artinya apabila pemerintah desa memiliki kemampuan dalam menjalankan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini akan mewujudkan kinerja pemerintah yang lebih baik dan akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Alasan peneliti mengambil objek penelitian tersebut dan berfokus pada kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa karena belum pernah dilakukan penelitian dan peneliti cukup mengetahui kondisi penelitian, serta peneliti telah melakukan observasi dan bertanya langsung dengan pemerintah desa tersebut. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Kesokoja Kecamatan Palue bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) telah berjalan dengan baik dan telah dievaluasi oleh dinas terkait di Kabupaten Sikka. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi selama ini adalah proses pencairan dana desa yang tidak sesuai dengan jadwal pencairannya, sehingga pihak desa mengalami keterlambatan pelaksanaan pembangunan dilapangan dan hal ini akan mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan evaluasi penggunaan dana desa, termasuk kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang sebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang ada dan kontrol dari pemerintahan dan masyarakat, kemudian pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk rapat tentang rincian penggunaan dana desa tidak diberitahukan dengan sepenuhnya kepada masyarakat hanya perangkat desa tertentu saja yang mengetahui dan transparansi tentang dana desa yang masih dirahasiakan kepada masyarakat setempat. Sehingga memunculkan kecemburuan sosial serta kecurigaan dari berbagai lapisan masyarakat desa yang berdampak pada kinerja pemerintah desa, yakni dengan terlambatnya pengajuan dan pertanggungjawaban dana desa.

Penelitian ini ditunjang oleh penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reski Wahdani (2021) dengan judul Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Jonjo cukup baik dari segi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hal ini dapat terwujud, karena aparat di Desa Jonjo sangat patuh terhadap peraturan atau kebijakan peraturan daerah dan arahan kepala desa (Wahdani, 2021).

Penelitian Fitri (2015) dengan judul Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi

bahwa belum berjalan dengan baik dari 5 indikator yang diteliti, 3 (tiga) indikator tidak berfungsi dengan baik seperti indikator produktivitas, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas tetapi hanya 2 (dua) yang berfungsi dengan baik yaitu Responsivitas dan tanggung jawab (Fitri, 2015).

Dari penelitian terdahulu di atas yang telah dilakukan pada masing-masing peneliti di daerah lain menunjukkan bahwa pengukuran kinerja di Desa Jonjo menggunakan indikator kinerja birokrasi publik dikategorikan cukup baik sedangkan di Desa Vatunonju belum berjalan dengan baik. Sehingga alasan yang mendasari peneliti memilih menggunakan teori tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (dalam Reski Wahdani, 2021) tersebut karena dari beberapa literatur kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory

Stewardship Theory

Teori yang menjadi dasar penelitian ini merupakan salah satu bagian dari teori agensi yaitu *stewardship theory*. *Stewardship theory* menjelaskan mengenai situasi yang mana para manajemen tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utama (Donaldson, 1991).

Desa

Definisi desa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah suatu landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pemerintah desa yang dimaksudkan adalah

penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan dan Asset Desa

Doli Siregar mengemukakan bahwa aset desa adalah suatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.

Jenis – Jenis Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas : kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan / atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (premendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Perencanaan

Menurut Sutamo (2004:109) perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Menurut Rue dan Byars (2006:6) *organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities* (pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan – kegiatan penugasan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya). Pelaksanaan (*organizing*) dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam suatu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja sama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Hansen (2005:116) mengatakan “pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur sebagai hasil yang mencapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pemimpin untuk mnegoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka”.

Kinerja Pemerintah Desa

Pada dasarnya kinerja (*performance*) merupakan hasil yang dicapai seseorang atau kelompok atau organisasi pada periode tertentu. Darmawi (2014) mendefenisikan kinerja pemerintah adalah menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan. Tjiptoherianto et al., dalam Munti dan Vadlevi (2017) menjelaskan kinerja dan kualitas kapasitas sumber daya manusia atau aparatur pemerintah dalam melaksanakan suatu fungsi termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur adalah kunci keberhasilan dari pada kinerja pemerintah, didalam sebuah organisasi yang menjadi tempat bekerja individu-individu diharapkan untuk dapat mewujudkan tujuan yang dikehendaki yang berdasarkan dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang diberikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain dikemukakan oleh Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2012:100), yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pribadi (*personal factors*), ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetisi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.
2. Faktor kepemimpinan (*leadership factors*), ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan dan dukungan yang dilakukan manajer dan tim leader.
3. *Team factors*, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
4. Faktor tim (*system factors*), ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
5. Faktor kontekstual (*kontekstual/situational factors*), ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Indikator Kinerja Pemerintah

Indikator kinerja merupakan ukuran dari hasil yang dicapai pada periode tertentu, pengukuran kinerja berkaitan dengan hasil yang diperoleh secara kualitatif berdasarkan perilaku yang dapat diamati.

Mitchell dalam Kusuma (2013), menyatakan bahwa indikator kinerja meliputi: kualitas kerja (*quality of work*), ketepatan (*promptness*), inisiatif (*initiative*), kemampuan (*capability*) dan komunikasi (*communication*). Menurut Dwiyanto dalam Fitri (2015) ada beberapa indikator yang biasanya digunakan mengukur kinerja birokrasi publik, sebagai berikut:

1. Produktivitas: Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
2. Kualitas Layanan: Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas: Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
4. Responsibilitas: Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
5. Akuntabilitas: Akuntabilitas publik menunjuk pada besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan

kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu di anggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian itu sebagai pengamat partisipasi atau berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara langsung dengan secermat mungkin sampai pada sekecil – kecilnya sekalipun.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka. Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli 20223.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis Data

Ada empat aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan dan pembuangan data yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Pengecekan Validitas Data

Dalam Siti Rohmah (2018:46) menurut Meleong Triangulasi merupakan Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Teknik triangulasi data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2.1 Produktivitas

Produktivitas: Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Dari hasil penelitian terhadap beberapa informan diatas, maka produktivitas di pemerintah Desa Kesokoja belum cukup baik atau belum sesuai dengan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun desa sendiri dan lebih mengedepankan kepentingan sendiri, dan terdapat juga anggota masyarakat yang tidak setuju sehingga mereka meminta ganti rugi apabila tanahnya dipakai sebagai alokasi dana desa. Sehingga hal tersebut dapat menjadi kendala dalam mewujudkan efektifitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Produktivitas dipemerintah Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka ini masih sangat rendah. Karena pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat desa. Padahal produktivitas dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah desa di Desa

Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Dalam mengukur produktivitas harus melalui tingkat efisien dan tingkat efektivitas yang baik dan harus memberikan pelayanan yang efektivitas dan efisien. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini aparat desa sangat diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka agar supaya pelayanannya dapat berjalan dengan baik terhadap masyarakat desa. Karena produktivitas ini merupakan salah satu indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta menilai keberhasilan kinerja pemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.

4.2.2 Kualitas Layanan

Kualitas Layanan: Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara murah dan mudah. Informasi mengenai kepuasan kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media masa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relative sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa kinerja di pemerintah Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka dalam hal kualitas pelayanan belum cukup baik, dikarenakan kualitas pelayanan pegawai dipemerintahan di Desa Kesokoja dalam konteks fenomena birokrasi belum ada kesinambungan dalam pelayanan kepada masyarakat atau belum mencapai kualitas pelayanan yang baik. Sehingga hal ini yang membuat kinerja aparat pemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka ini belum berjalan dengan baik dalam pengelolaan dana desa karena faktor kualitas pelayanannya yang masih sangat terhitung rendah atau belum mencapai standar sesungguhnya. Pelayanan masih belum maksimal karena adanya keterbatasan dana dalam mencapai suatu program seperti halnya dalam pencapaian program pemberian fasilitas kegiatan PKK masih dalam tahapan pelaksanaan dalam kemajuan menuju kesuksesan.

Dimana penilaian kualitas pelayanan ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Sesuai dengan penilaian kualitas pelayanan diatas maka

kualitas pelayanan di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka belum cukup baik. Oleh karena itu, kualitas layanan harus ditingkatkan supaya kinerja pemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka agar menjadi lebih baik.

4.2.3 Responsivitas

Responsivitas: Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa responsivitas organisasi dalam menyusun agenda - agenda yang diprioritaskan dalam proses pelayanan ini sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai karena pemerintah desa di Desa kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka tidak lagi merasa kesulitan dengan apa yang ingin dikerjakan sudah diketahui dan sudah sesuai, serta respon dari masyarakat terhadap pengalokasian dana desa baik karena adanya transparansi dari pemerintah Desa Kesokoja kepada masyarakat. Hal ini terlihat pada kemampuan aparat pemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka dalam merespon cepat apa yang menjadi keinginan publik. Sehingga segala program akan dapat diketahui yang mana harus menjadi program prioritas untuk dilaksanakan pada program kedepannya di pemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.

4.2.4 Responsibilitas

Responsibilitas: Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun impisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan beberapa informan diatas maka penilaian responsibilitas sudah sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka. Kinerja dipemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka dalam

melaksanakan tugas serta fungsinya sudah berdasarkan pada administrasi yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, tanggungjawab ini penting untuk tetap dijaga dan ditingkatkan demi terciptanya kinerja di pemerintah Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka ini agar menjadi lebih baik dalam pemberian pelayanan kepada publik. Tanggungjawab yang baik dalam sebuah instansi ini adalah salah satu indikator dalam penilaian kinerja pemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.

4.2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas: Akuntabilitas publik menunjuk pada besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka akuntabilitas yang diterapkan pada kantor desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka bila diukur berdasarkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam hal pelayanan terhadap masyarakat desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka ini dikatakan sudah baik, karena sudah berdasarkan pada prinsip – prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program pemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka. Kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip administrasi yang di laksanakan oleh pemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka ini menggambarkan bahwa tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik, dan respon dari masyarakat sangat baik karena dalam pengalokasian dana desa di pemerintah Desa Kesokoja sangat terbuka dan dapat dipercaya oleh masyarakat Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Karena aparat pemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka patuh terhadap peraturan yang ada, dan akuntabilitas ini juga berbicara tentang masalah kepatuhan bawahan terhadap pimpinan dan tanggungjawab terhadap tugas dan fungsi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Kinerja pemerintah desa di Desa Kesokoja Kecamatan Palue kabupaten Sikka dalam pengelolaan alokasi dana desa sejalan dengan penelitian Silvester Aktasuh Koni Odat (2021) bahwa dari segi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas sudah cukup baik. Namun pada penelitian yang dilakukan di Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka ada dua indikator yang belum sesuai atau belum berjalan dengan baik yaitu indikator produktivitas dan kualitas layanan. Sehingga dapat dijelaskan teori yang didukung oleh Agus Dwiyanto (dalam Reski Wahdani, 2021).

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory stewardship*. Menurut Donaldson & Davis (1991) menyatakan bahwa *theory stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan – tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Theory stewardship* menggambarkan bahwa pemerintah desa bertanggungjawab terhadap masyarakat desa untuk mengelola kekayaan yang telah dipercayanya, yang dimana masyarakat desa bertindak sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *steward*.

Hubungan antara *theory stewardship* dengan penelitian ini menyatakan bahwa peran pemerintah desa (*steward*) sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan melaksanakan tugas untuk kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik dana desa (*principal*). Keterkaitan keduanya dapat ditunjukkan dari akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemilik sebagai pengguna informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah desa di desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka juga merupakan organisasi yang dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan yang baik dalam menampung aspirasi masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini maka, kepala desa dapat diharapkan mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik dana desa atau masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa : pada pengukuran indikator kinerja birokrasi publik yang berlandaskan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yaitu :

1. Indikator produktivitas pengelolaan alokasi dana desa belum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Indikator kualitas pelayanan kurang baik atau belum sesuai, dimana penilaian kualitas pelayanan ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan terhadap masyarakat.
3. Indikator responsivitas terlihat bahwa masyarakat memiliki partisipasi dalam membangun desanya sendiri sudah cukup baik.
4. Indikator responsibilitas terlihat bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di pemerintahan Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka sudah cukup baik karena sudah berdasarkan pada prinsip – prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program – program pemerintahan desa.
5. Indikator Akuntabilitas cukup optimal seperti usulan – usulan masyarakat yang disampaikan diterima dan ditindaklanjuti dari pihak pemdes dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja pemerintah desa yang baik ini sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, sehingga penulis menyarankan bahwa :

1. Penilaian produktivitas dan kualitas pelayanan dipemerintah Desa Kesokoja harus ditingkatkan.
2. Bagi Desa Kesokoja diharapkan lebih efektif dan efisien serta harus disiplin terhadap waktu.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu yang akan digunakan saat akan melakukan wawancara, karena jam kerja didesa Adabang masih kurang efektif. Sehingga peneliti mengalami kesulitan saat akan melakukan wawancara terhadap pihak informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, I., Basuki, P., & Riva'i, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2379. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p28>
- Astuty, E., & Hany Fanida, E. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1(2), 1–15.
- Dekrita, Y. A., Wisang, I. V., & Uran, N. S. (2020). Wulanggitang Kabupaten Flores Timur Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi , Universitas Nusa Nipa Maumere. *Jurnal AKuntansi Dan Investasi*, 2(6), 52–62.

- Fitri. (2019). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan B iromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 3(11), 180–192.
- Henrikus Herdi, Emilianus Eo Kutu Goo, Euprasius Mario Sanda. (2022). Analisis Pelaksanaan Tatakelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Journal ACCOUNTING Unipa Maumere*, volume 1, Issue 1.
- Indra Dwi Persada. (2016). *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa (Suatu Penelitian Diskriptif Tentang Kineja Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Di Desa Margoagung Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman)* (Vol. 147, Issue March). Program Studi Ilmu Pemerintahan Jenjang Strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmid” Yogyakarta.
- Lamandasa, S. R., & Ntada, S. (2022). Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan. *Jurnal Ekomen*, 20(2), 27–38.